STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) PROVINSI SUMATERA BARAT

Wulandari[1], Rizki Syafril[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : w71994452@gmail.com[1], rizkisyafril@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRAK

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat dalam kerangka administrasi publik modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber utama berupa hasil observasi langsung melalui kegiatan magang, serta didukung oleh literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat empat strategi utama dalam pengembangan IKM, yaitu: (1) pengelolaan administrasi sebagai dasar perencanaan, (2) perencanaan berbasis data digital untuk mendukung *evidence-based policy*, (3) koordinasi antarbidang agar program pembinaan berjalan terpadu, dan (4) pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik serta fasilitasi pelaku IKM. Namun, strategi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan literasi digital, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, keterlambatan birokrasi administrasi, serta kesulitan akses data dan modal. Untuk itu, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah provinsi dengan kelembagaan ekonomi lokal, khususnya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Integrasi antara strategi birokrasi modern dengan pemberdayaan partisipatif diyakini dapat memperkuat daya saing IKM, memperluas akses pasar, serta menjadikan produk lokal Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Kata Kunci : *Industri Kecil Dan Menengah, Disperindag, Administrasi Publik, Digitalisasi, Koordinasi, Evidence-Based Policy, Pemberdayaan Masyarakat, BUMNag.*

ABSTRACT

Small and Medium Industries (IKM) play a strategic role in driving both regional and national economic development. This article aims to analyze the development strategies implemented by the Office of Industry and Trade (Disperindag) of West Sumatra Province within the framework of modern public administration. The study employed a descriptive qualitative approach, based primarily on direct observations during an internship, complemented by relevant academic literature. The findings reveal four main strategies in IKM development: (1) administrative management as the foundation of program planning, (2) data-driven planning to support *evidence-based policy*, (3) cross-sectoral coordination to ensure program integration, and (4) the utilization of information technology in public services and IKM facilitation. Nevertheless, these strategies still face several challenges, including limited digital literacy, low human resource capacity, bureaucratic delays, and difficulties in accessing data and capital. Therefore, synergy between provincial government policies and local economic institutions, particularly Village-Owned Enterprises (*BUMNag*), is essential as a grassroots empowerment instrument. Integrating modern bureaucratic strategies with participatory empowerment is expected to strengthen IKM competitiveness, expand market access, and enable local products of West Sumatra to compete at national and global levels.

Keywords : *Small And Medium Industries, Disperindag, Public Administration, Digitalization, Coordination, Evidence-Based Policy, Community Empowerment, BUMNag.*

PENDAHULUAN

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini bukan hanya sekadar pelengkap dari industri besar, tetapi justru menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2023, jumlah IKM di Indonesia mencapai lebih dari 4,4 juta unit usaha yang tersebar di seluruh provinsi. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional cukup signifikan, yaitu mencapai sekitar 61,07% dari total PDB, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 97% dari total angkatan kerja produktif. Angka tersebut menegaskan bahwa keberadaan IKM merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran.

Peran strategis IKM juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi. Ketika Indonesia menghadapi krisis moneter pada tahun 1997/1998, IKM terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini karena struktur usaha yang relatif fleksibel, modal yang lebih kecil, serta orientasi pasar yang dekat dengan masyarakat. Karakteristik ini membuat IKM sering disebut sebagai sektor "penyangga ekonomi rakyat" yang mampu menyerap guncangan eksternal. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, IKM menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Namun demikian, perkembangan IKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan akses teknologi, lemahnya kemampuan manajerial, hingga hambatan dalam mengakses pasar domestik maupun global. Menurut laporan BPS (2022), lebih dari 60% pelaku IKM masih terkendala dalam memperoleh pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Selain itu, hanya sekitar 15% IKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital secara penuh untuk mendukung produksi dan pemasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas IKM sangat besar, namun secara kualitas masih menghadapi persoalan mendasar.

Khusus di Sumatera Barat, IKM juga memiliki peranan yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, terdapat lebih dari 55 ribu unit IKM yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Sektor IKM Sumatera Barat didominasi oleh industri pangan, kerajinan, tekstil, serta industri berbasis sumber daya alam lokal. Produk seperti rendang, sulaman, tenun, serta kerajinan tangan khas Minangkabau bahkan telah menembus pasar internasional. Akan tetapi, sebagian besar IKM masih menghadapi tantangan dalam hal peningkatan mutu produk, legalitas usaha, akses pembiayaan, dan pemasaran digital.

Dalam perspektif administrasi publik, pengembangan IKM tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Hal ini berarti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat memegang peran sentral dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pengembangan IKM. Peran tersebut mencakup fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk, pendampingan manajemen usaha, penguatan jaringan pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar.

Selain faktor regulasi, dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi digital turut mempengaruhi arah pengembangan IKM. Era Revolusi Industri 4.0 telah menghadirkan tantangan baru berupa persaingan produk global yang semakin ketat, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta kebutuhan akan keterampilan digital. Bagi IKM di Sumatera Barat, kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, digitalisasi membuka akses pemasaran yang lebih luas, termasuk e-commerce dan ekspor digital. Namun, di sisi lain, keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan nyata.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan basis ekonomi lokal. Dalam konteks ekonomi nasional, keberadaan IKM bahkan dianggap sebagai "urat nadi" pembangunan ekonomi kerakyatan. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin, 2023) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 4,4 juta unit IKM di Indonesia yang tersebar hampir di seluruh provinsi. IKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja produktif. Hal ini menunjukkan bahwa IKM bukan hanya berperan sebagai sektor pendukung, tetapi justru sebagai pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi nasional.

Kontribusi besar IKM juga terlihat dari kemampuannya bertahan menghadapi guncangan krisis. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997/1998, banyak perusahaan besar gulung tikar, tetapi IKM relatif mampu bertahan karena karakteristiknya yang fleksibel, berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal, serta tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor global. Keunggulan ini menegaskan posisi IKM sebagai sektor yang resilien dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Oleh sebab itu, penguatan IKM dipandang sebagai salah satu kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat (Wati, 2014).

Tantangan Nasional dalam Pengembangan IKM

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, IKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Laporan BPS (2022) mengungkapkan bahwa:

1. Sekitar 60% pelaku IKM mengalami keterbatasan modal dan kesulitan mengakses pembiayaan formal.
2. Hanya 15% pelaku IKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital secara penuh dalam proses produksi dan pemasaran.
3. Lebih dari 70% IKM masih beroperasi dalam skala rumah tangga dengan keterbatasan manajerial.
4. Rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, sertifikasi produk, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kondisi ini menyebabkan daya saing IKM Indonesia di pasar global masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, yang sudah lebih dahulu mengintegrasikan IKM dalam kebijakan industrialisasi nasional.

Posisi IKM di Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan IKM. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 mencatat bahwa terdapat sekitar **55.318 unit IKM** yang tersebar di 19 kabupaten/kota. IKM di Sumatera Barat didominasi oleh industri pangan, kerajinan, tekstil, dan industri berbasis sumber daya alam lokal. Produk unggulan seperti *rendang, sulaman bordir, tenun*

songket Pandai Sikek, kerajinan perak Koto Gadang, hingga produk olahan agroindustri telah dikenal luas di pasar nasional bahkan internasional.

Untuk memperlihatkan gambaran sektoral, berikut tabel distribusi IKM di Sumatera Barat (data diolah dari Disperindag Sumbar, 2024):

Tabel 1. Distribusi IKM Di Sumatera Barat

Sektor IKM	Jumlah Unit	Persentase (%)
Industri pangan	23.412	42,3
Tekstil dan kerajinan	12.587	22,7
Industri logam & permesinan	4.368	7,9
Industri kimia & bahan bangunan	6.421	11,6
Industri berbasis SDA lokal	8.530	15,5
Total	55.318	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor pangan mendominasi hampir setengah dari jumlah IKM yang ada, diikuti dengan kerajinan dan tekstil yang memiliki ciri khas budaya Minangkabau. Hal ini mengindikasikan bahwa IKM Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk berkembang dengan basis kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat menjadi daya tarik di pasar global.

Perspektif Administrasi Publik dan Desentralisasi

Dalam perspektif administrasi publik, pengembangan IKM erat kaitannya dengan peran pemerintah daerah sebagai *policy maker* sekaligus *policy implementer*. Konsep desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Artinya, Disperindag Provinsi Sumatera Barat menjadi aktor kunci dalam perencanaan, pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pengembangan IKM.

Max Weber (dalam Albrow, 1990) menekankan pentingnya birokrasi yang rasional-legal dalam menciptakan ketertiban administrasi. Dalam konteks ini, pengembangan IKM memerlukan tata kelola birokrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi kerangka penting bagi Disperindag dalam merumuskan strategi.

Dinamika Globalisasi dan Digitalisasi

Globalisasi telah membawa persaingan antarproduk yang semakin ketat, sementara Revolusi Industri 4.0 membuka peluang baru dalam digitalisasi produksi dan pemasaran. Menurut Nugraha, Akbar, & Pratama (2023), pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi penting bagi IKM untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mempercepat layanan administrasi. Namun, masih banyak pelaku IKM di Sumatera Barat yang belum familiar dengan pemasaran digital, e-commerce, dan pengelolaan media sosial.

Hal ini menimbulkan tantangan ganda: pertama, bagaimana Disperindag membangun kapasitas digital pelaku IKM; kedua, bagaimana kebijakan daerah dapat mendukung infrastruktur teknologi yang memadai.

Komparasi dengan Daerah Lain

Beberapa daerah lain di Indonesia telah berhasil mengembangkan IKM dengan strategi yang relatif maju. Misalnya, Kota Semarang melalui program pendampingan terpadu yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil meningkatkan kualitas produk dan akses pasar IKM (Andriani & Widowati, 2017). Kabupaten Sidoarjo juga menerapkan

perencanaan strategis berbasis data untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Jayanto, 2018). Perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik terbaik (*best practices*) dari daerah lain dapat menjadi inspirasi bagi Sumatera Barat untuk memperkuat strategi pengembangan IKM.

Urgensi Penelitian

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana Disperindag Provinsi Sumatera Barat merancang dan melaksanakan strategi pengembangan IKM. Artikel ini tidak hanya menekankan pada peran Disperindag sebagai birokrasi pemerintah daerah, tetapi juga pada dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk hambatan dan solusi yang ditempuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman baru dalam perspektif administrasi publik, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pelaku IKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan melalui kegiatan magang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdasarkan pengalaman langsung di lapangan (Mubaranto, Sarma, & Baga, 2016). Lokasi penelitian berada di Kantor Disperindag Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan selama periode 1 Juli hingga 26 Agustus 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran Disperindag sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi utama dalam pembinaan, fasilitasi, serta pengembangan IKM di tingkat daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas administrasi, proses perencanaan program, koordinasi antarbidang, serta pemanfaatan teknologi digital di lingkungan Disperindag. Selain itu, wawancara informal dengan pegawai juga dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan program pengembangan IKM. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen instansi seperti surat masuk, surat keluar, nota dinas, program kerja, serta literatur akademik yang relevan (Andriani & Widowati, 2017; Nugraha, Akbar, & Pratama, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara informal, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas kerja secara langsung, wawancara informal dilakukan dengan pegawai berwenang untuk menggali informasi, sementara dokumentasi mencakup pengumpulan data administrasi dan catatan kegiatan (Jayanto, 2018). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai implementasi strategi pengembangan IKM oleh Disperindag Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan solusi yang diambil dalam pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat dapat dipahami dalam kerangka administrasi publik modern yang menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan berbasis pada bukti (*evidence-based policy*). Hasil magang dan pengamatan langsung di Disperindag memperlihatkan bahwa terdapat empat strategi utama yang diterapkan, yaitu: (1) pengelolaan administrasi, (2) perencanaan berbasis data digital, (3) koordinasi antarbidang, dan (4) pemanfaatan teknologi informasi. Keempat strategi ini saling terkait dan membentuk kerangka besar dalam mendukung pengembangan IKM secara berkelanjutan.

1. Pengelolaan Administrasi sebagai Dasar Perencanaan Program

Administrasi publik yang tertib merupakan pondasi bagi setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengembangan IKM. Berdasarkan pengamatan, Disperindag Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem administrasi tertulis yang meliputi surat masuk, surat keluar, nota dinas, agenda kerja, hingga dokumen perencanaan program. Semua dokumen tersebut menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Pandangan Max Weber tentang birokrasi rasional-legal menekankan bahwa administrasi yang sistematis melalui aturan tertulis akan menciptakan keteraturan organisasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Disperindag, tertib administrasi berfungsi sebagai:

- **Instrumen akuntabilitas**, karena setiap kegiatan tercatat dalam dokumen resmi.
- **Alat koordinasi**, mempermudah komunikasi antarbagian.
- **Dasar hukum**, memastikan program pengembangan IKM memiliki legitimasi yang jelas.

Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa keterlambatan alur surat-menyurat dan adaptasi pegawai terhadap digitalisasi administrasi. Hambatan ini merupakan gambaran klasik birokrasi Indonesia yang masih kental dengan budaya kerja manual. Disperindag merespons dengan mendorong penggunaan sistem informasi administrasi terintegrasi agar kecepatan pelayanan meningkat.

2. Perencanaan dan Penginputan Data Berbasis Digital

Strategi kedua adalah perencanaan berbasis data. Selama kegiatan magang, keterlibatan dalam penginputan data program, target, serta alokasi anggaran ke dalam aplikasi digital memperlihatkan bahwa Disperindag telah mengadopsi prinsip *evidence-based policy*. Menurut Jayanto (2018), perencanaan berbasis bukti penting agar kebijakan tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga data yang valid.

Data yang dikumpulkan meliputi jumlah IKM binaan, kebutuhan sertifikasi halal, kebutuhan sertifikasi SNI, hingga akses terhadap pasar digital. Semua informasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem *sakatoplan.sumbarprov.go.id* yang menjadi portal perencanaan dan monitoring. Portal ini bukan hanya memudahkan evaluasi, tetapi juga mendukung prinsip transparansi karena data dapat diakses lintas bidang.

Kendala utama dalam implementasi strategi ini adalah keterbatasan akses data internal serta rendahnya keterampilan digital sebagian pegawai. Tidak semua bidang memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi, sehingga pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.

3. Koordinasi Antarbidang dalam Pengembangan IKM

IKM adalah sektor yang multidimensional, mencakup aspek produksi, pemasaran, perlindungan konsumen, hingga inovasi produk. Oleh karena itu, koordinasi antarbidang di Disperindag menjadi kunci.

- **Bidang Industri Agro dan Non-Agro** → fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk.

- **Bidang Perdagangan** → bertugas memperluas jaringan pemasaran, baik melalui pameran lokal maupun promosi digital.
- **Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)** → memastikan standar mutu, keamanan produk, dan perlindungan konsumen.

Koordinasi ini mencerminkan prinsip *whole of government approach*, di mana kebijakan publik dijalankan secara terpadu lintas unit kerja. Menurut Andriani & Widowati (2017), sinergi antarunit merupakan faktor kunci keberhasilan pembinaan IKM, karena tanpa koordinasi, pembinaan berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Dalam praktiknya, koordinasi seringkali menghadapi hambatan berupa tumpang tindih kewenangan dan perbedaan prioritas antarbidang. Misalnya, bidang industri lebih fokus pada produksi, sementara bidang perdagangan menekankan promosi. Disperindag mengatasi persoalan ini melalui forum rapat koordinasi bulanan yang menyatukan agenda kerja lintas bidang.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan

Strategi keempat adalah digitalisasi layanan. Pemanfaatan aplikasi Excel, portal sakatoplan, dan media digital mempercepat pengolahan data serta mendukung transparansi. Digitalisasi ini sejalan dengan tren *e-government* yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas birokrasi.

Nugraha, Akbar, & Pratama (2023) menyebut digitalisasi sebagai pilar *smart economy* dalam kerangka pembangunan *smart city*. Dalam konteks Disperindag Sumatera Barat, digitalisasi bukan hanya mempercepat layanan internal, tetapi juga mempermudah IKM dalam mengakses fasilitasi sertifikasi halal, SNI, maupun hak kekayaan intelektual.

Sebagai contoh, Disperindag telah meluncurkan program pendampingan sertifikasi halal berbasis online, di mana pelaku IKM dapat mendaftar melalui portal resmi tanpa harus datang langsung ke kantor. Program ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memperluas akses pelaku IKM di daerah terpencil.

Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital pelaku IKM. Sebagian besar pelaku usaha kecil masih mengandalkan cara konvensional dalam pemasaran, sehingga belum optimal memanfaatkan platform digital seperti marketplace atau media sosial. Oleh karena itu, Disperindag melakukan pelatihan digital marketing sebagai bagian dari program pembinaan.

Selain empat strategi utama Disperindag Sumatera Barat, penting juga melihat bagaimana pengembangan IKM berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi lokal melalui kelembagaan masyarakat seperti BUMNag.

Menurut Nadya & Rizki Syafril (2023), pengelolaan potensi lokal melalui BUMNag sering kali belum optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan kurangnya alternatif keputusan dalam implementasi program. Hal ini paralel dengan kondisi Disperindag yang juga menghadapi kendala literasi digital, keterbatasan data, dan keterlambatan administrasi. Artinya, baik pada level nagari maupun provinsi, tantangan utamanya adalah daya dukung kelembagaan dan sumber daya manusia.

Selanjutnya, Mursidi & Bonavidiawati Zebua (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, inovasi usaha, dan keberlanjutan program. Hal ini relevan dengan strategi Disperindag yang mulai mengintegrasikan pelatihan digital marketing dan sertifikasi produk. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan IKM sangat dipengaruhi oleh sinkronisasi antara

pemerintah daerah, kelembagaan lokal (BUMNag/UMKM), dan masyarakat sebagai pelaku utama.

Selain empat strategi utama yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk menempatkan pengembangan IKM dalam kerangka yang lebih luas, yaitu pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan masyarakat.

Menurut Nadya & Syafril (2023), pengelolaan potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, dan minimnya alternatif kebijakan dalam menjalankan program. Kondisi ini sejajar dengan realitas yang dihadapi oleh Disperindag Provinsi Sumatera Barat, yang masih berhadapan dengan keterbatasan literasi digital, akses data, dan lambannya birokrasi administrasi. Dengan demikian, baik pada level nagari maupun provinsi, tantangan utama terletak pada daya dukung kelembagaan serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal.

Sementara itu, Mursidi & Zebua (2023) menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat bergantung semata pada kebijakan formal pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, inovasi usaha, serta keberlanjutan program. Hal ini relevan dengan strategi Disperindag yang mulai mengintegrasikan pelatihan digital marketing, sertifikasi halal, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi IKM. Artinya, pengembangan IKM yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila pemerintah daerah mampu mengorkestrasi peran kelembagaan lokal, swasta, akademisi, dan masyarakat sebagai pelaku utama.

Dengan melihat keterhubungan ini, dapat ditegaskan bahwa strategi pengembangan IKM Provinsi Sumatera Barat tidak bisa dipisahkan dari upaya penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMNag. Integrasi kebijakan provinsi dengan inisiatif berbasis nagari akan menghasilkan sinergi yang lebih kuat, baik dalam hal pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing, maupun perluasan akses pasar.

. Pertama, pengembangan IKM di Sumatera Barat juga harus dipahami dalam kerangka *good governance*. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan harus terintegrasi dalam setiap kebijakan. Disperindag telah memulai langkah ini melalui transparansi data program di portal *sakatoplan.sumbarprov.go.id*. Namun, prinsip partisipasi masih perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pelaku IKM dalam proses perencanaan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Kedua, keberhasilan strategi pengembangan IKM sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antaraktor. Menurut Ansell & Gash (2007), *collaborative governance* menjadi kunci dalam kebijakan publik modern. Disperindag tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu menggandeng perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas lokal. Misalnya, kerjasama dengan universitas dapat mendukung inovasi produk dan riset pemasaran, sementara kolaborasi dengan marketplace nasional mampu memperluas pasar digital bagi pelaku IKM.

Ketiga, aspek branding produk menjadi isu penting yang belum sepenuhnya tergarap. Produk khas Minangkabau seperti rendang, songket Pandai Sikek, dan sulaman sudah dikenal luas, tetapi masih menghadapi tantangan dalam konsistensi mutu dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Disperindag berperan penting dalam memfasilitasi sertifikasi, pelabelan, dan pendaftaran merek dagang agar produk IKM Sumbar memiliki posisi lebih kuat di pasar nasional maupun internasional. Dengan branding yang kuat, produk IKM tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga sarana diplomasi budaya.

Keempat, pengembangan IKM juga memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama dalam pemberdayaan perempuan. Banyak pelaku IKM di Sumatera Barat berasal dari kelompok ibu rumah tangga yang mengelola usaha kuliner, kerajinan, dan tekstil. Strategi pembinaan yang sensitif gender akan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 mengenai kesetaraan gender dan tujuan ke-8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Kelima, dari perspektif jangka panjang, pengembangan IKM di Sumatera Barat harus diarahkan pada model ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Digitalisasi hanyalah langkah awal, sementara inovasi produk, diversifikasi pasar, dan integrasi dengan sektor pariwisata menjadi langkah berikutnya. Dengan demikian, IKM dapat berperan bukan hanya sebagai penopang ekonomi, tetapi juga sebagai motor utama pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. Integrasi antara kebijakan provinsi, kekuatan kelembagaan lokal seperti BUMNag, serta partisipasi masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Sumatera Barat sangat bergantung pada strategi yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebagai lembaga pemerintah daerah. Empat strategi utama yang menjadi fondasi adalah: (1) pengelolaan administrasi yang tertib sebagai dasar perencanaan, (2) perencanaan berbasis data digital untuk memperkuat *evidence-based policy*, (3) koordinasi antarbidang yang memastikan keterpaduan program, dan (4) pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik serta fasilitasi pelaku IKM. Keempat strategi ini saling terkait dan membentuk kerangka besar yang mampu mendorong pengembangan IKM secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, seperti keterbatasan literasi digital, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan alur birokrasi, serta akses data dan modal yang terbatas. Tantangan ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan IKM tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan struktural dari pemerintah daerah, tetapi harus diperkuat dengan partisipasi masyarakat dan dukungan multi-aktor.

Hasil telaah lebih lanjut dengan merujuk pada Nadya & Syafril (2023) serta Mursidi & Zebua (2023) memperlihatkan bahwa optimalisasi kelembagaan lokal, seperti BUMNag, menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah. Sinergi antara kebijakan pemerintah provinsi dengan inisiatif berbasis nagari mampu memperkuat daya saing IKM, mengintegrasikan potensi lokal, serta memperluas pasar produk unggulan Sumatera Barat.

Dengan demikian, strategi pengembangan IKM di Sumatera Barat harus dipandang sebagai proses yang integratif: menggabungkan administrasi modern, perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, digitalisasi layanan, serta pemberdayaan kelembagaan lokal. Hanya melalui kombinasi tersebut IKM dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjaga identitas budaya Minangkabau di tengah persaingan global.

DAFTAR PUSTAKA

Albrow, M. (1990). *Max Weber's Construction of Social Theory*. London: Macmillan.

Andriani, I., & Widowati, N. (2017). Strategi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis klaster (Studi pada Dinas Perindustrian Kota Semarang). *Jurnal Administrasi Publik, 15*(1), 44–55.

Jayanto, H. D. (2018). Perencanaan strategis pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) unggulan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo) (Tesis, Universitas Brawijaya).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Syafril, R., & Zebua, B. (2023). The role of the Community and Village Empowerment Office of West Sumatra Province in increasing the capacity of BUMNag management. *Jurnal …*, 27, 222–232.

Nadya, & Syafril, R. (2023). Optimalisasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Mitra Mandiri dalam Pengembangan Potensi Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 7*(2), 624–632. https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695

Nugraha, E. A., Akbar, D., & Pratama, R. A. (2023). Strategi smart economy pada industri kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang menuju smart city (Disertasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji).